IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN TANA TORAJA

Yulianus M. Rombeallo, Marchelina Rante

*Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia Toraja
yrombeallo@ukitoraja.ac.id ; marchelina@ukitoraja.ac.id*

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui proses pendaftaran tanah sistematis lengkap dan implementasi reforma agraria dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Tana Toraja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan prosedur pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten Tana Toraja dilaksanakan dalam 8 tahapan yakni 1. Perencanaan 2. Pembentukan panitia dan satgas PTSL 3. Penyuluhan, 4. Pengumpulan data fisik dan data yuridis 5. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak 6. Pengumuman data fisik dan data yuridis 7. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak dan pengesahan 8. Pembukuan dan penerbitan sertifikat. Implementasi reforma agraria dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten Tana Toraja belum berjalan optimal namun pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Tana Toraja telah sesuai dengan salah satu tujuan dari reforma agraria mengenai penanganan konflik/ sengketa pertanahan.

Kata Kunci : *Implementasi; Reforma Agraria; Pendaftaran Tanah*

Abstract

The purpose of the study was to determine the process of complete systematic land registration and the implementation of agrarian reform in the implementation of complete systematic land registration in Tana Toraja Regency. The method used in this study is empirical legal research. The results of the study indicate that the procedure for complete systematic land registration in Tana Toraja Regency is carried out in 8 stages, namely 1. Planning 2. Formation of the PTSL committee and task force 3. Counseling, 4. Collection of physical data and legal data 5. Research on legal data for proof of rights 6. Announcement of physical data and legal data 7. Confirmation of conversion, recognition of rights and granting of rights and ratification 8. Bookkeeping and issuance of certificates. The implementation of agrarian reform in the activities of complete systematic land registration in Tana Toraja Regency has not been optimal, but the implementation of complete systematic land registration in Tana Toraja Regency has been in accordance with one of the objectives of agrarian reform regarding handling land conflicts/disputes.

Keywords: *Settlement, Land Disputes, Customary Institutions*

1. Pendahuluan

Tanah merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional dan berperan dalam penentuan kesejahteraan dan kemakmuran setiap warga masyarakat Indonesia. Tanah sebagai tempat manusia berpijak, sebagai tempat tinggal, mendirikan bangunan untuk tempat peribadatan ataupun tempat usaha, bertani dan bercocok tanam, dan bisa menjadi sumber penghidupan yang memiliki nilai

Implementasi Reforma Agraria Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Tana Toraja

ekonomis untuk kesejahteraan manusia. ¹ Dalam perjalanan perkembangan aturan kepemilikan tanah di Indonesia dikenal istilah reforma agraria yang artinya penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berlandaskan prinsip keadilan melalui penataan aset demi kemakmuran rakyat Indonesia. Reforma agraria mempunyai sejarah yang panjang, sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa permasalahan di bidang pertanahan merupakan masalah yang sulit, rumit, dan sensitive. ²

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia aturan mengenai tanah masih menggunakan aturan dari peninggalan pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Sampai saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria salah satunya adalah memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Ketetapan dari tujuan memberikan jaminan kepastian hukum ini mengadung pengertian bahwa hal-hal yang menyangkut kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah harus diikuti dengan kegiatan pendaftaran tanah yang dimiliki oleh seseorang maupun oleh badan hukum ke Kantor Pertanahan agar mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah yang dikuasainya atau yang dimilikinya.

Dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kegiatan pendaftaran tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional tersebut meliputi:

1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Selanjutnya pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sesuai ketentuan tersebut pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 2 (dua) cara, yaitu pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik. ³ Dalam perkembangannya Pendaftaran Tanah sistematis dulunya dikenal dengan istilah Proyek Operasi Nasional Agraria yang disingkat Prona yang kemudian disempurnakan menjadi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau disingkat PTSL. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pelaksanaannya dimulai pada era

¹ Winny Sanjaya, 2023, "Dampak Kebijakan Satu Peta/One Map Policy di Bidang Pertanahan Terhadap Sertipikat sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia", LITRA Vol 2, No 2.

² Subhan Zein, 2019, "Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol 9, No 2.

³ I Gusti Ayu Dewi Uttari Matas, dkk, 2023, "Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Secara Sporadik Berdasarkan Pipil Sebagai Bukti: (Studi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Timur)", Private Law Vol 3, No 1.

Implementasi Reforma Agraria Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Tana Toraja

pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kalla yang mana PTSL terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Pemerintah (selanjutnya disebut RPJMN). Dengan mengacu RPJMN melalui Kementerian ATR/BPN gencar melaksanakan pendaftaran tanah pertama kali melalui pendaftaran sistematis yang disebut dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tetap dilakukan sampai sekarang.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja telah melaksanakan program PTSL dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang tersebar di beberapa kelurahan dan lembang di wilayah hukum BPN Kabupaten Tana Toraja. Terhitung sejak tahun 2021 sebanyak 2.536 sertifikat tanah dari 3.821 permohonan penerbitan sertifikat tanah telah diserahkan. Pada tahun 2022 sebanyak 2.397 sertifikat tanah dari 2.497 permohonan penerbitan sertifikat tanah telah diserahkan. Dan pada tahun 2023 sebanyak 1.681 dari 2.565 permohonan penerbitan sertifikat tanah telah diserahkan. Dari uraian tersebut di atas, menarik untuk dikaji selanjutnya tentang bagaimana prosedur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di BPN Kabupaten Tana Toraja dan apakah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh BPN Kabupaten Tana Toraja telah sesuai dengan implementasi dalam Reforma Agraria, dimana Reforma Agraria menekankan pada penanganan sengketa/konflik agraria dan pemerataan kepemilikan tanah sehingga peneliti mengambil judul Implementasi Reforma Agraria dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Tana Toraja.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui prosedur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di BPN Kabupaten Tana Toraja serta Untuk mengetahui implementasi reforma agraria dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di BPN Kabupaten Tana Toraja. Urgensi diadakannya penelitian ini karena penulis ingin melihat sejauh mana eksistensi penerapan reforma agraria di masa sekarang.

2. Metode

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian di bidang hukum yang dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang di butuhkan setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴

⁴ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Prosedur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di BPN Kabupaten Tana Toraja

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diselenggarakan atas prakarsa Pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri ATR/BPN yang dimandatkan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi maupun Kepala Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota, yang dibantu oleh Panitia Ajudikasi. PTSL bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.⁵

Pendaftaran tanah sistematis lengkap pada Kantor BPN Kabupaten Tana Toraja PTSL telah dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Dari hasil observasi pada kantor BPN Kabupaten Tana Toraja di 2 tahun terakhir PTSL dilakukan tersebar pada beberapa Kecamatan, Kelurahan dan Lembang. Pada tahun 2024 PTS dilaksanakan di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Mengkendek, Sangalla Utara, dan Malimbong. Sedangkan pada tahun 2025 PTSL dilaksanakan Di Kelurahan Tengan, Lembang Ke'pe Tinoring, Lembang Sarapeang, Lembang Satandung, Lembang Bulian Massabu, Lembang Tokesan, dan Leatung Matallo.

Dari wawancara dengan Muhammad Justang, S.H selaku Ketua Satgas Yuridis Panitia Adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap BPN Kabupaten Tana Toraja menjelaskan bahwa PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematis. Sistematis itu artinya mencakup satu desa/ lembang atau kelurahan. Dan oleh Andi Hamzah, S.H selaku ketua Panitia adjudikasi PTSL Kab. Tana Toraja menjelaskan bahwa Pendaftaran tanah sistematis lengkap ini merupakan kegiatan dari pemerintah secara khusus pemerintah kementerian Agraria bagi seluruh masyarakat indonesia termasuk seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk melakukan dan mendaftarkan tanahnya dalam kegiatan PTSL ini.

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap tentu diperlukan berkas-berkas yang harus disiapkan oleh warga masyarakat yang hendak ingin mendaftarkan tanahnya. Hasil wawancara dengan Mumammad Justang, S.H. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sitematis lengkap untuk warga masyarakat

⁵ Gianni Putrisasmita, 2023, "Kedudukan program pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam kerangka reforma agraria untuk mewujudkan kepastian hukum pertanahan di indonesia", LITRA Vol 3, No 1.

Implementasi Reforma Agraria Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Tana Toraja

Tana Toraja selaku pemohon dalam PTSL perlu mempersiapkan berkas-berkas seperti :

1. Alas hak :
 - Surat keterangan jual beli;
 - Surat keterangan hibah;
 - Surat keterangan warisan .
2. SKT (surat keterangan Kepemilikan Tanah) yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat;
3. Surat Penguasaan Fsisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh Pemohon;
4. Berkas- berkas administrasi lainnya seperti :
 - KTP;
 - KK;
 - SPPTB/ PBB;
5. Dan mengisi Formulir khusus dalam pelaksanaan PTSL.

Pelaksanaan prosedur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada kabupaten Tana Toraja dilakukan dengan 8 tahapan sesuai penjelasan dari Andi Hamzah, S.H selaku ketua panitia adjudikasi PTSL Kab. Tana Toraja bahwa berdasarkan instruksi presiden Nomor 2 tahun 2108 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan sesuai mandat dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap maka tahapan pelaksanaan PSTL di wilayah hukum Kab. Tana Toraja meliputi :

1. Perencanaan
Kegiatan perencanaan meliputi Penentuan lokasi PTSL oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Kabupaten Tana Toraja, penyusunan peta dasar pendafatran, dan koordinasi dengan stakeholder terkait (Pemerintah daerah atau instansi terkait lainnya);
2. Pembentukan panitia dan satgas PTSL
Penunjukan ketua Panitia Adjudikasi, penetapan tugas dan wewenang panitia tersebut. Selanjutnya Ketua Adjudikasi membentuk Satuan tugas yakni, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis.
3. Penyuluhan
Penyuluhan dilakukan sebelum kegaitan PTSL dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder terkait. Dalam kegiatan penyuluhan PTSL yang dilaksanakan di Tana Toraja melibatkan Pemerintah Lembang/Kelurahan, Babinsa dan Bhabinkantibnas. Hal demikian dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam teknis pelaksanaan PTSL nantinya.

4. Pengumpulan data fisik dan data yuridis

Pengumpulan data selanjutnya dilakukan oleh satgas data fisik dan satgas data yuridis. Satgas fisik melakukan pengumpulan data mengenai bidang tanah, termasuk batas-batas tanah sedangkan satgas yuridis lebih kepada informasi kepemilikan tanah yang akan dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat tanahnya.

5. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak

Tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua data yang disampaikan telah memenuhi standar teknis pendaftaran tanah. Data yuridis yang terkumpul kemudian diteliti untuk memastikan keabsahannya, memvalidasi kepemilikan tanah, dan mengidentifikasi potensi sengketa.

6. Pengumuman data fisik dan data yuridis

Pengumuman data fisik dan yuridis dilakukan Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pengumuman ini dimuat di kantor lembang/kelurahan dan kecamatan, hal demikian bertujuan untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang/bidang-bidang tanah yang termuat pengumuman diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan.

7. Penegasan konversi, pengakuan hak, pemberian hak dan pengesahan

Dalam tahap penegasan konversi dilakukan terhadap hak atas tanah yang sebelumnya belum bersertifikat yang disesuaikan berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang ada. Selanjutnya tahap pengakuan didasarkan pada bukti penguasaan fisik tanah dan keterangan saksi, serta bukti-bukti lain yang sah. Setelah melalui proses penegasan dan pengakuan hak, kemudian dilakukan pemberian hak atas tanah yang sah, yang biasanya berupa sertifikat hak atas tanah. Penegasan konversi, pengakuan, dan pemberian hak dilakukan setelah tahap pengumuman selesai dan pengumuman tersebut telah disahkan oleh Ketua Panitia.

8. Pembukuan dan penerbitan sertifikat

Pembukuan dilakukan setelah semua data fisik dan yuridis telah diverifikasi untuk selanjutnya dicatat dalam buku tanah. Buku tanah ini merupakan catatan resmi mengenai hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang. Dan kemudian dilakukan Penerbitan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon. Dengan selesainya tahapan ini, proses PTSL untuk bidang tanah tersebut dianggap selesai, dan pemohon memiliki kepastian hukum atas kepemilikan tanahnya.

Implementasi Reforma Agraria Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Tana Toraja

Dari uraian diatas berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa Prosedur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di BPN Kabupaten Tana Toraja dilakukan melalui 8 tahapan yakni : 1. Perencanaan 2. Pembentukan panitia dan satgas PTSL 3. Penyuluhan 4. Pengumpulan data fisik dan data yuridis 5. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak 6. Pengumuman data fisik dan data yuridis 7. Penegasan konversi, pengakuan hak, pemberian hak dan pengesahan 8. Pembukuan dan penerbitan sertifikat.

3.2 Implementasi Reforma Agraria Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di BPN Kabupaten Tana Toraja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau Negara sedangkan agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian. Reforma Agraria adalah agenda besar yang merupakan amanat Konstitusi khususnya Pasal 33 UUD NRI 1945. Amanat tersebut kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan kemudian ditegaskan kembali di dalam Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Reforma Agraria adalah suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶

Dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Percepatan Reforma Agraria dimaknai sebagai penataan aset (asset reform) dan penataan akses (aces reform). Penataan aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Selanjutnya Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, dijelaskan tujuan reforma agraria, yaitu :

1. Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan;
2. Menangani sengketa dan konflik agraria;

⁶ Aditya Nurahmani & Momamad Robi Rismansyah, 2020, "Analisis Pengaturan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Upaya Percepatan Reforma Agraria", *Padjajaran Law Review* Vol 8, No 1

Implementasi Reforma Agraria Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Tana Toraja

3. Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui
4. pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
5. Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan;
6. Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi;
7. Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan;
8. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Untuk menguraikan implementasi reforma agraria dalam pelaksanaan PTSL di kabupaten Tana Toraja maka perlu dilihat apakah tujuan dari reforma agraria seperti yang telah diuraikan diatas tercapai atau tidak. Dari hasil wawancara dengan Andi Hamzah, S.H selaku ketua Panitia adjudikasi PTSL pada Kabupaten Tana Toraja menjelaskan bahwa Reforma agraria mempunyai perbedaan dengan pelaksanaan PTSL, reforma agraria mempunyai program tersendiri seperti redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang dalam pelaksanaannya pada Kantor BPN Kab. Tana Toraja program tersebut merupakan bagian dari seksi 3 yakni seksi survei dan pemetaan. Sedangkan PTSL merupakan penerbitan sertifikat untuk pertama kali. Mengenai tujuan reforma agraria terkait redistribusi tanah nantinya bagian survei dan pemetaan lah yang memilih lokasi tanah pertanian/perkebunan atau berasal dari pelepasan tanah hutan untuk didistribusikan kepada masyarakat program tersebut bukanlah merupakan bagian dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Salah satu tujuan utama dari reforma agraria yakni menangani konflik/sengketa pertanahan yang dalam pelaksanaan PTSL di kabupaten Tana Toraja sudah berjalan dengan optimal. Dari wawancara dengan Ketua Satgas Yuridis PTSL Kab. Tana Toraja Muhammad Justang, S.H menjelaskan bahwa melalui PTSL konflik/sengketa tanah menjadi jelas tata cara penanganannya. PTSL bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah mengenai tanah. Sebelum ada PTSL masalah-masalah kepemilikan tanah terkadang tidaklah diketahui oleh para pihak yang bersangkutan karena ada klaim sepihak oleh pihak tertentu namun setelah adanya PTSL kepemilikan Tanah tersebut menjadi jelas. Ketika dilakukan kegiatan PTSL karena mempersyaratkan pengecekan data yuridis sehingga diketahui apakah status tanah yang misalnya tanah warisan sudah terbagi atau belum. Sehingga mengenai alas haknya nantinya jelas sehingga penerbitan sertifikatnya tidak cacat hukum. Point pentingnya ialah penyelesaian konflik/sengketa pertanahan tidak serta merta harus berujung pada terbitnya sertifikat tanah, namun kita harus mengetahui masalahnya sehingga memberikan solusi sehingga pendaftaran itu tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Implementasi Reforma Agraria Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Tana Toraja

Senada dengan hal tersebut penjelasan dari ketua Panitia Adjudikasi PTSL Kab. Tana Toraja bapak Andi Hamzah, S.H yang menjelaskan bahwa penanganan konflik/sengketa pertanahan dalam kegiatan PTSL dilakukan ketika ada sanggahan atau keberatan dari salah satu pihak penyelesaian sengketa tanah dalam kegiatan PTSL diutamakan melalui musyawarah atau mediasi di Kantor BPN Kabupaten Tana Toraja atau dikantor Lembang/Desa dan atau kelurahan untuk menghindari proses hukum yang panjang dan berbiaya. Jika musyawarah/ mediasi tidak berhasil, sengketa dapat dibawa ke pengadilan untuk diputuskan setelah sengketa selesai, maka penerbitan sertipikat hak atas tanah akan diterbitkan sesuai dengan putusan atau kesepakatan yang ada.

Salah satu karakteristik pada masyarakat toraja utara dan tana toraja ialah status kepemilikan tanah yang bersifat tanah tongkonan. Tanah tongkonan merupakan tanah dengan status kepemilikan bersama yang belum terbagi.⁷ Sehingga bisa berpotensi menjadi persoalan lainnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Joshua Mervin Arung Labi, dkk dijelaskan bahwa Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Toraja Utara yaitu masih kuatnya hukum adat dalam kepemilikan dan penguasaan tanah tongkonan yang bersifat komunal, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah belum mengakomodir dengan jelas bentuk dan format pendaftaran dan penerbitan tanah ulayat yang sesuai, serta banyak dari anggota keluarga tongkonan yang merantau mengakibatkan surat pernyataan yang harus ditandatangani semua anggota keluarga tongkonan apabila tanah tongkonan tersebut hendak didaftarkan. Hal lainnya adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat adat tentang pentingnya pendaftaran tanah sehingga menimbulkan keengganan bagi masyarakat adat untuk mendaftarkan tanahnya.⁸ Senada dengan hal tersebut kendala utama dalam Pelaksanaan Pendaftaran tanah sistematis di Kabupaten Tana Toraja terdapat pada status tanah yang merupakan tanah tongkonan. Menurut Muhamad Justang, S.H selaku ketua satgas yuridis PTSL di Kabupaten Tana Toraja Kendala utama ialah status tanah yang bersifat tanah tongkonan yang kepemilikannya belum jelas karena masih milik bersama sehingga sulit diuraikan kepemilikannya secara pribadi.

⁷ Marchelina Rante & Yulianus M. Rombeallo, 2023, *“Tinjauan Sosiologis Terhadap Pembagian Hak Waris Tanah Menurut Hukum Waris Adat Toraja Pa’ Rinding di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla’ Selatan”*, UNES LAW REVIEW Vol 6, No 1.

⁸ Joshua Melvin Arung Labi, dkk, 2021, *“Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan”*, Mulawarman Law Review Vol 6, No 1.

Implementasi Reforma Agraria Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Tana Toraja

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Reforma Agraria dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kab. Tana Toraja belum terlaksana secara optimal hal ini dikarenakan dalam program reforma agraria terkait redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian program dari seksi 3 bagian survei dan pemetaan PTSL berfokus pada kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Mengenai tujuan reforma agraria yang berkaitan dengan penanganan konflik/sengketa pertanahan hal tersebut telah berjalan optimal sebelum adanya kegiatan PTSL masalah-masalah kepemilikan tanah terkadang tidaklah diketahui oleh para pihak yang bersangkutan karena ada klaim sepihak oleh pihak tertentu namun setelah adanya PTSL kepemilikan Tanah tersebut menjadi jelas.

4. Kesimpulan

Prosedur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di BPN Kabupaten Tana Toraja dilakukan melalui 8 tahapan yakni : Perencanaan, Pembentukan panitia dan satgas PTSL, Penyuluhan, Pengumpulan data fisik dan data yuridis, Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, Pengumuman data fisik dan data yuridis, Penegasan konversi dan pengakuan hak dan pemebrian hak (pengesahan) dan Pembukuan dan penerbitan sertifikat. Implementasi Reforma Agraria dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kab. Tana Toraja belum terlaksana secara optimal hal ini dikarenakan dalam program reforma agraria terkait redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian program dari seksi 3 bagian survei dan pemetaan PTSL berfokus pada kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Mengenai tujuan reforma agraria yang berkaitan dengan penanganan konflik/sengketa pertanahan hal tersebut telah berjalan optimal sebelum adanya kegiatan PTSL masalah-masalah kepemilikan tanah terkadang tidaklah diketahui oleh para pihak yang bersangkutan karena ada klaim sepihak oleh pihak tertentu namun setelah adanya PTSL kepemilikan Tanah tersebut menjadi jelas.

5. Referensi

- Aditya Nurahmani & Momamad Robi Rismansyah, 2020, *"Analisis Pengaturan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Upaya Percepatan Reforma Agraria"*, Padjajaran Law Review Vol 8, No 1.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gianny Putrisasmita, 2023, *"Kedudukan program pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam kerangka reforma agraria untuk mewujudkan kepastian hukum pertanahan di indonesia"*, LITRA Vol 3, No 1.

Implementasi Reforma Agraria Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Tana Toraja

- I Gusti Ayu Dewi Uttari Matas, dkk, 2023, *“Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Secara Sporadik Berdasarkan Pipil Sebagai Bukti: (Studi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Timur)”*, Private Law Vol 3, No 1.
- Joshua Melvin Arung Labi, dkk, 2021, *“Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan”*, Mulawarman Law Review Vol 6, No 1.
- Marchelina Rante & Yulianus M. Rombeallo, 2023, *“Tinjauan Sosiologis Terhadap Pembagian Hak Waris Tanah Menurut Hukum Waris Adat Toraja Pa’ Rinding di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla’ Selatan”*, UNES LAW REVIEW Vol 6, No 1.
- Subhan Zein, 2019, *“Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang di Indonesia”*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol 9, No 2.
- Winny Sanjaya, 2023, *“Dampak Kebijakan Satu Peta/One Map Policy di Bidang Pertanahan Terhadap Sertipikat sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia”*, LITRA Vol 2, No 2.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- Instruksi presiden Nomor 2 tahun 2108 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia